



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



TAHUN 2025

**BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dapat tersusun sesuai jadwal.

Laporan ini disusun dengan mendasar pada Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati Bolaang Mongondow atas amanah yang telah diberikan dalam urusan wajib di Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Isi laporan ini menunjukkan gambaran sejauh mana kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025.

Meskipun segala upaya telah dilakukan namun laporan ini masih jauh dari harapan. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai upaya kami menuju kesempurnaan LKIP ini. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 kami sampaikan untuk diperiksa.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya laporan ini, semoga dapat memberi manfaat.

Lolak, 31 Desember 2025

Kepala Badan



DAFTAR ISI

	Halaman
KATAPENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	6
B. JUMLAH PEGAWAI	8
C. BERDASARKAN PANGKAT, GOLONGAN DAN UMUR	9
D. SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN.....	10
E. PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. BOLMONG.....	10
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 12
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	12
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN.....	15
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	15
D. RENCANA KINERJA TAHUNAN	16
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
1. PENGUKURAN KINERJA	17
i. METODE PENGUKURAN KINERJA	17
ii. METODE PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN.....	19
2. PENGUKURAN TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN	19
3. PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN	40
B. REALISASI ANGGARAN	42
1. ANGGARAN DAN REALISASI APBD	42
2. ANGGARAN DAN REALISASI PER KEGIATAN.....	42
 BAB IV PENUTUP	 49
A. TINJAUAN UMUM.....	49
B. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHANNYA	50

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	9
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Golongan Dan Umur	9
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural	9
Tabel 1.4. Sarana dan Prasarana	10
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah	14
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025	15
Tabel 2.3. Penetapan Indikator Kunci Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	16
Tabel 2.4. Rencana Kinerja Tahunan Keuangan Daerah Tahun 2025	16
Tabel 3.1. Hasil Capaian Opini LHP BPK RI atas LKPD	20
Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Capaian opini LHP BPK RI atas LKPD dengan Tahun sebelumnya	21
Tabel 3.3. Perbandingan Target dan Capaian opini LHP BPK RI atas LKPD Selama 5 Tahun	22
Tabel 3.4. Perbandingan Target dan Capaian opini LHP BPK RI atas LKPD Dengan BKAD Provinsi	23
Tabel 3.5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung tercapainya Opini BPK RI	26
Tabel 3.6. Capaian Kinerja Peningkatan PAD Badan Keuangan Daerah Tahun 2025	27
Tabel 3.10. Program dan Kegiatan pendukung tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	32

Tabel 3.11. Presentase Nilai Aset Yang Tidak Bermasalah	34
Tabel 3.15. Program dan Kegiatan pendukung tercapainya Nilai Aset Yang Tidak Bermasalah.....	39
Tabel 3.16. Capaian Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Tahun 2025.....	40
Tabel 3.17 Capaian realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja 2025	41
Tabel 3.18. Perbandingan Capaian Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2025	42
Tabel 3.19. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025	43
Tabel 4.1. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025.....	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi OPD	6
Gambar 3.1. Opini BPK RI atas LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020	19
Gambar 3.2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.....	20
Gambar 3.3. Rekapitulasi Aset tetap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020.....	22

BAB.I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. BOLAANG MONGONDOW

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari :

a) Kepala Badan;

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pengelolaan keuangan daerah guna merumuskan kebijakan teknis, memberikan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

b) Sekretaris,

Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan, pelayanan administrasi umum, hukum, kepegawaian, keuangan, program dan pelaporan yang membawahi dua Sub. Bagian terdiri dari:

i. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

ii. Perencana Badan (Jabatan Fungsional)

c) Bidang Perimbangan, Pendataan dan Pendaftaran

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah, retribusi daerah dan melakukan pendataan objek pajak dan subjek pajak serta melakukan koordinasi perimbangan daerah dengan pusat dan bagi hasil pajak dan non pajak, yang membawahi tiga seksi terdiri dari:

i. Seksi Pendaftaran dan Penilaian

ii. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

iii. Seksi Perimbangan Daerah dan Pusat

d) Bidang Penagihan dan Keberatan

Mempunyai tugas mempersiapkan surat setoran pajak daerah dan melaksanakan perhitungan penetapan pajak / retribusi daerah untuk melakukan penagihan, perencanaan kegiatan- kegiatan monitoring, pengawasan dan evaluasi kegiatan / proyek dari berbagai instansi yang membawahi dua seksi terdiri dari:

- i. Seksi Penagihan dan Pemeriksaan
- ii. Seksi Keberatan dan Pengurangan

e) Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas melakukan dan mengordinasikan kegiatan perbendaharaan, pemeriksaan terhadap realisasi anggaran rutin dan pembangunan, penerimaan, pengeluaran serta membina dan menyelesaikan masalah perbendaharaan dan verifikasi. Yang membawahi dua seksi terdiri dari:

- i. Seksi Bendahara Umum Daerah
- ii. Seksi belanja Daerah

f) Bidang Akuntansi

Mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan transaksi yang menjadi beban APBD berdasarkan kebijakan sistem akuntansi. Yang membawahi dua seksi terdiri dari :

- i. Seksi Pembukuan
- ii. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

g) Bidang Anggaran

Mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dalam tata kelola administrasi keuangan daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku. Yang membawahi dua seksi terdiri dari :

- i. Seksi Anggaran Pendapatan
- ii. Seksi Anggaran Belanja

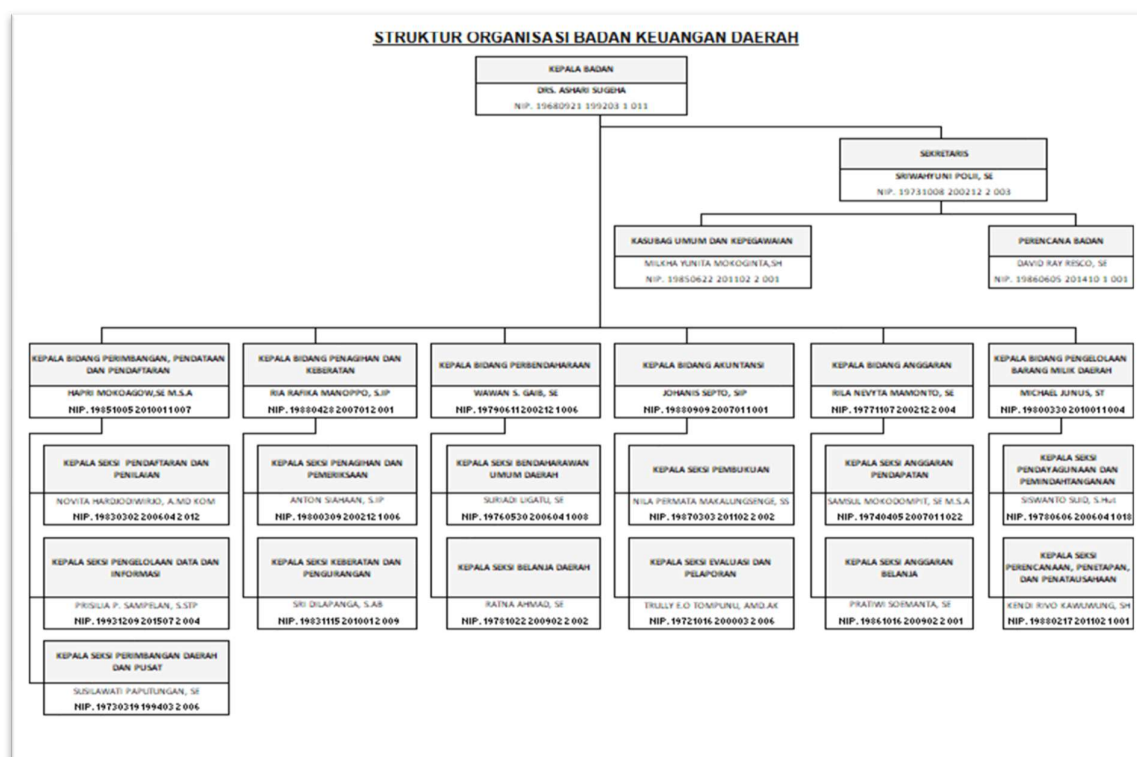
h) Bidang Pengelolaan Barang Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang pengelolaan barang daerah meliputi

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan pengawasan dan pengendalian. Yang membawahi 2 seksi terdiri dari :

- i. Seksi Perencanaan, Penetapan dan Penghapusan
- ii. Seksi Pendayagunaan dan Pemindahtanganan

GAMBAR 1.1. STRKTUR ORGANISASI OPD



B. JUMLAH PEGAWAI

Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 berjumlah 64 Pegawai. Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.1. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO.	DISIPLIN ILMU	JUMLAH PEGAWAI	
		PNS	PPPK
1.	S3 / Doktor	0	0
2.	S2 / Magister	2	0
3.	S1 / Sarjana	35	1

4.	Diploma IV	1	0
5.	Diploma III	4	0
6.	Diploma II	0	0
7.	Diploma I	0	0
8.	SLTA / Sederajat	18	2
9.	SLTP / Sederajat	0	0
10.	Sekolah Dasar	0	0
	Jumlah	61	3
	Jumlah Keseluran PNS dan PPPK	64	

Tabel 1.2. Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH PEGAWAI	
		PNS	PPPK
1	Laki - Laki	31	2
2	Perempuan	30	1
	Jumlah	61	3
	Jumlah Seluruh Pegawai PNS dan PPPK	64	

Tabel 1.3. Berdasarkan Pangkat, Golongan Ruang

NO.	PANGKAT, GOLONGAN RUANG	JUMLAH PEGAWAI	
		PNS	PPPK
1.	IV/e	0	0
2.	IV/d	0	0
3.	IV/c	1	0
4.	IV/b	0	0
5.	IV/a	5	0
6.	III/d	17	0

7.	III/c	7	0
8.	III/b	10	0
9.	III/a	9	0
10.	II/d	6	0
11.	II/c	4	0
12.	II/b	1	0
13.	II/a	1	0
14.	I/d	0	0
15.	I/c	0	0
16.	I/b	0	0
17.	I/a	0	0
18.	X	0	0
19.	IX	0	1
20.	VII	0	0
21.	V	0	3
22.	III	0	0
23.	I	0	0
	Jumlah	61	3
	Jumlah Keseluran PNS dan PPPK	64	

Tabel 1.3. Berdasarkan Jabatan

NO.	ESELON	JUMLAH PEGAWAI	
		PNS	PPPK
1.	I a	0	0
2.	I b	0	0
3.	II a	0	0

4.	II b	1	0
5.	III a	1	0
6.	III b	6	0
7.	IV a	14	0
8.	IV b	0	0
9.	Jabatan Fungsional	1	0
10.	Jabatan Pelaksana	37	3
	Jumlah	61	3
	Jumlah Keseluruhan PNS dan PPPK	64	

C. SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki Sarana dan Prasarana yang memadai dan dalam kondisi baik. Adapun sarana dan prasarana yang digunakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai berikut:

Tabel 1.4. Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi
1.	Gedung dan Bangunan	Baik
2.	Peralatan Mesin	Baik
3.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Baik

D. PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Mengidentifikasi berbagai faktor isu-isu strategis yang mempengaruhi keberhasilan di masa lalu serta hal-hal yang masih belum berjalan secara optimal melalui perumusan permasalahan agar dapat disusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah untuk jangka lima tahun ke depan yang dijabarkan dalam Rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025.

Selanjutnya rumusan permasalahan tersebut dikelompokkan menjadi isu strategis yang merupakan permasalahan utama untuk dijadikan prioritas. Analisis isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai

kondisi yang tidak ideal dimasa depan untuk meningkatkan efektivitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan rencana kerja kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana Prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain :

- a. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- b. Mengikut sertakan Aparatur dalam mengikuti pendidikan lanjutan, kursus dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme bidang perencanaan, sehingga dapat dihasilkan Aparatur Pengelola Keuangan yang kreatif dan inovatif.
- c. Menerapkan *The Right Man on The Right Place* dalam pelaksanaan tugas aparatur guna ketepatan dan keakuratan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
- d. Mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih baik dalam menunjang Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
- e. Optimalisasi perlengkapan dan peralatan yang memadai, serta penataan gedung kantor guna pemenuhan standar kelayakan kerja.

Mewujudkan perencanaan yang berorientasi pada *money follow program*.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 – 2026 adalah: “Bolaang Mongondow yang baru, berbudaya, berdaya saing dan mandiri sebagai lumbung pangan indonesia timur”.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 – 2026 tersebut dirumuskan melalui 4 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Bolaang Mongondow yang berbudaya dan berdaya saing;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri bertumpu pada potensi sumberdaya lokal
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bebas KKN;
5. Mewujudkan Bolaang Mongondow Sebagai Lumbung Pangan di Indonesia Bagian Timur.

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 – 2026 maka disusun tujuan pembangunan selama empat tahun kedepan sebagai berikut:

Tujuan adalah Meningkatkan Penyelenggaraan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

Indikator Sasaran :

1. Capaian opini LHP BPK RI atas LKPD
2. Persentasi Peningkatan PAD
3. Persentase Nilai Aset yang tidak bermasalah

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
						2022	2023	2025	2025	2026
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Nilai LHP BPK RI	100	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Capaian opini LHP BPK RI atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					Persentasi Peningkatan PAD	6,25%	10 %	10 %	10 %	10 %
					Persentase nilai Aset yang tidak bermasalah	83,59%	95 %	96 %	97 %	98 %

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai tindak lanjut komitmen Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah tahun 2023-2026, maka disusunlah Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Bupati Bolaang Mongondow dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Pendukung	Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Capaian opini LHP BPK RI atas LKPD	100 (WTP)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	238.094.234.592,00
2		Persentase peningkatan PAD	10	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.172.804.945,00
3		Persentase nilai aset yang tidak bermasalah	96	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.074.875.716,00

Gambaran secara utuh bagaimana Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 tercantum pada lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Penetapan Indikator Kunci Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan	Capaian opini LHP BPK RI atas LKPD	Nilai opini BPK RI	100 (WTP)
2	Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\text{Realisasi tahun ini}-\text{realisasi tahun lalu}}{\text{Realisasi tahun lalu}} \times 100$	10
3		Persentase nilai aset yang tidak bermasalah	$\frac{\text{Nilai Aset yang tidak bermasalah}}{\text{Nilai Aset}} \times 100$	97

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran atau turunan dari dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra).

RKT TA. 2025 ini juga merupakan gambaran kegiatan dan output Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2025. Untuk lebih jelasnya Rencana Kinerja Tahunan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4. Rencana Kinerja Tahunan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Capaian opini LHP BPK RI atas LKPD	100 (WTP)
2		Persentase peningkatan PAD	10%
3		Persentase nilai aset yang tidak bermasalah	97%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Banyak metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauhmana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

i. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan melihat indikator kinerja pada level sasaran Tahun 2025. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dalam rangka pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa program atau kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- a) Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- b) Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

ii. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

>85	= Sangat berhasil
$70 < X \leq 85$	= Berhasil
$55 < X \leq 70$	= Cukup Berhasil
≤ 55	= Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai *mean* (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang ada di kelompok sasaran tersebut.

	Jumlah indikator untuk setiap kategori x Nilai <i>mean</i> setiap kategori
Capaian Sasaran=	$\frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori x Nilai } mean \text{ setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori *sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil*.

2. PENGUKURAN TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN

Pengukuran capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran Ke 1 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

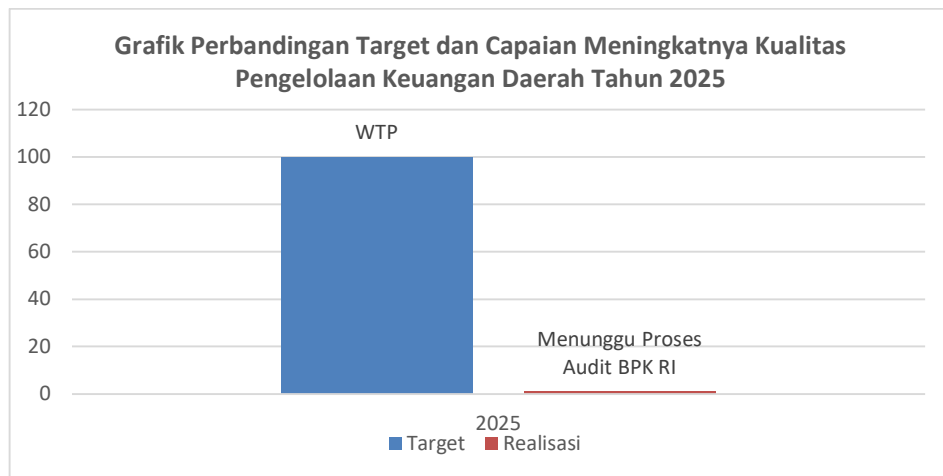
Pengukuran capaian kinerja sasaran : “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah” dengan indikator sasaran Capaian opini LHP BPK RI atas LKPD dapat dihitung dengan Opini BPK RI= Nilai LHP

Tabel 3.1. Perbandingan Target dan Capaian opini LHP BPK RI atas LKPD

Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target akhir renstra
	Target	Realisasi	%	Target
Capaian opini LHP BPK RI atas LKPD	100 (WTP)	Dalam Proses Audit BPK	0	100 (WTP)

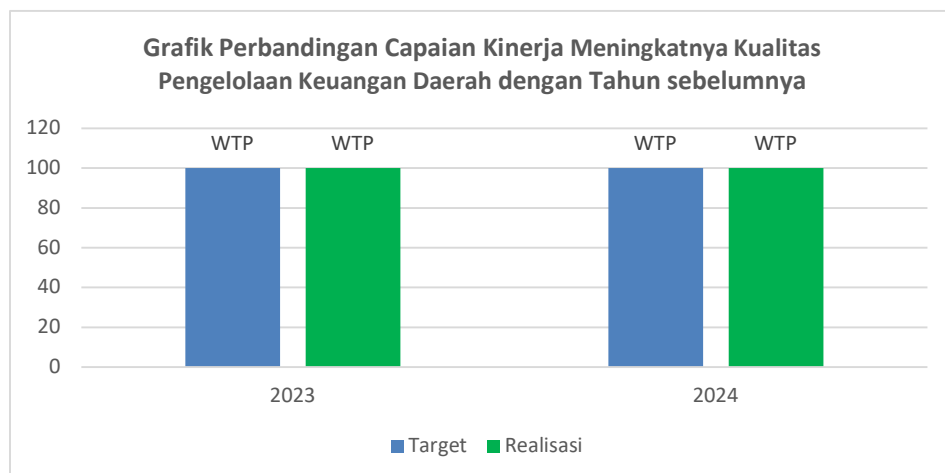
- a) Untuk pengukuran Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun 2025 dengan Target 100 (WTP) dan untuk Realisasi belum diterima karena masih dalam tahap Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Dalam upaya untuk mencapai target indikator sasaran tersebut, Badan Keuangan Daerah melalui Bidang Akuntansi melaksanakan rekonsiliasi pertanggungjawaban Tahun 2025 dari Perangkat Daerah dan bidang Aset melaksanakan rekonsiliasi aset tetap yang terdiri dari Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, irigasi dan jaringan, konstruksi dan pengerjaan, aset tetap lainnya serta Aset lainnya yang berupa Barang Persediaan, hutang piutang dan lain-lain sedang dalam proses pengajuan neraca aset tetap. Sehingga dengan upaya yang dilakukan diharapkan opini BPK dapat memperoleh hasil yang maksimal sesuai target pada indikator sasaran sedangkan untuk Tahun 2024 Opini BPK untuk capaian indikator opini LHP BPK RI atas LKPD mendapat nilai 100 % atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Capaian opini LHP BPK RI atas LKPD dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023			Capaian Kinerja Tahun 2024			Capaian Kinerja Terhadap Target akhir renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
Capaian opini LHP BPK RI atas LKPD	100 (WTP)	100 (WTP)	100	100 (WTP)	100 (WTP)	100	100 (WTP)

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 belum diterima karena masih dalam tahap Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Sedangkan Tahun 2023 dan 2024 Capaian Kinerja 100 atau WTP dari Target yang ada. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



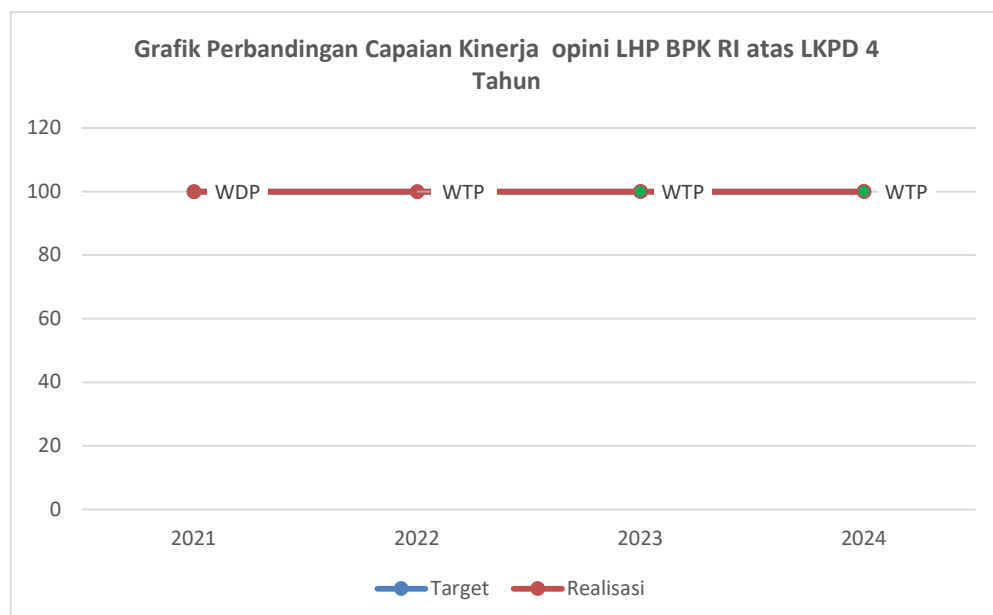
Tabel 3.3. Perbandingan Target dan Capaian opini LHP BPK RI atas LKPD selama 5 Tahun

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target akhir renstra	
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Capaian opini LHP BPK RI atas LKPD	100 (WTP)	100 (WTP)	100 (WTP)	100 (WTP)	100 (WTP)	Dalam Proses Audit BPK	0	100 (WTP)	100 (WTP)

c) Perbandingan Capaian Kinerja Capaian opini LHP BPK RI atas LKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat disajikan sebagai berikut:

1. Tahun 2021 Target 100/WTP dengan realisasi 100/WTP.
2. Tahun 2022 Target 100/WTP dengan realisasi 100/WTP.
3. Tahun 2023 Target 100/WTP dengan realisasi 100/WTP.
4. Tahun 2024 Target 100/WTP dengan realisasi 100/WTP.
5. Tahun 2025 Target 100/WTP dengan realisasi Dalam Proses Audit BPK.

Perbandingan Capaian Kinerja Capaian opini LHP BPK RI atas LKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selama 5 Tahun Dapat dilihat pada Grafik berikut:

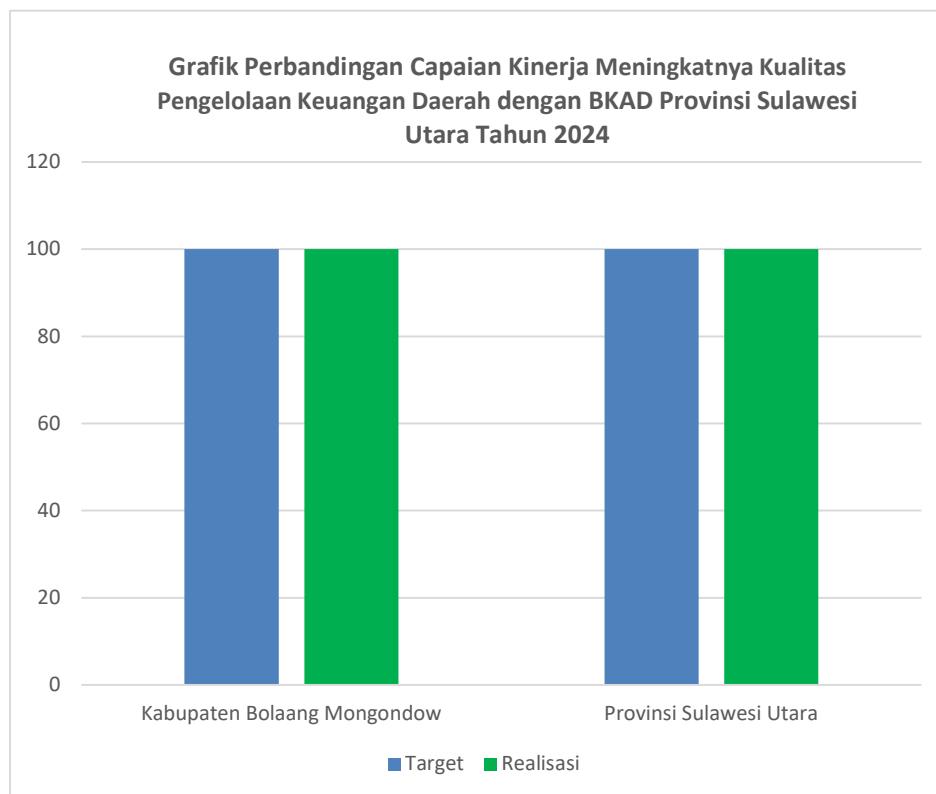


**Tabel 3.4. Perbandingan Target dan Capaian opini LHP BPK RI atas LKPD
dengan BKAD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Kabupaten Bolaang Mongondow			BKAD Provinsi Sulawesi Utara			Capaian Kinerja Terhadap Target akhir renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
Capaian opini LHP BPK RI atas LKPD	100 (WTP)	100 (WTP)	100	100 (WTP)	100 (WTP)	100	100 (WTP)

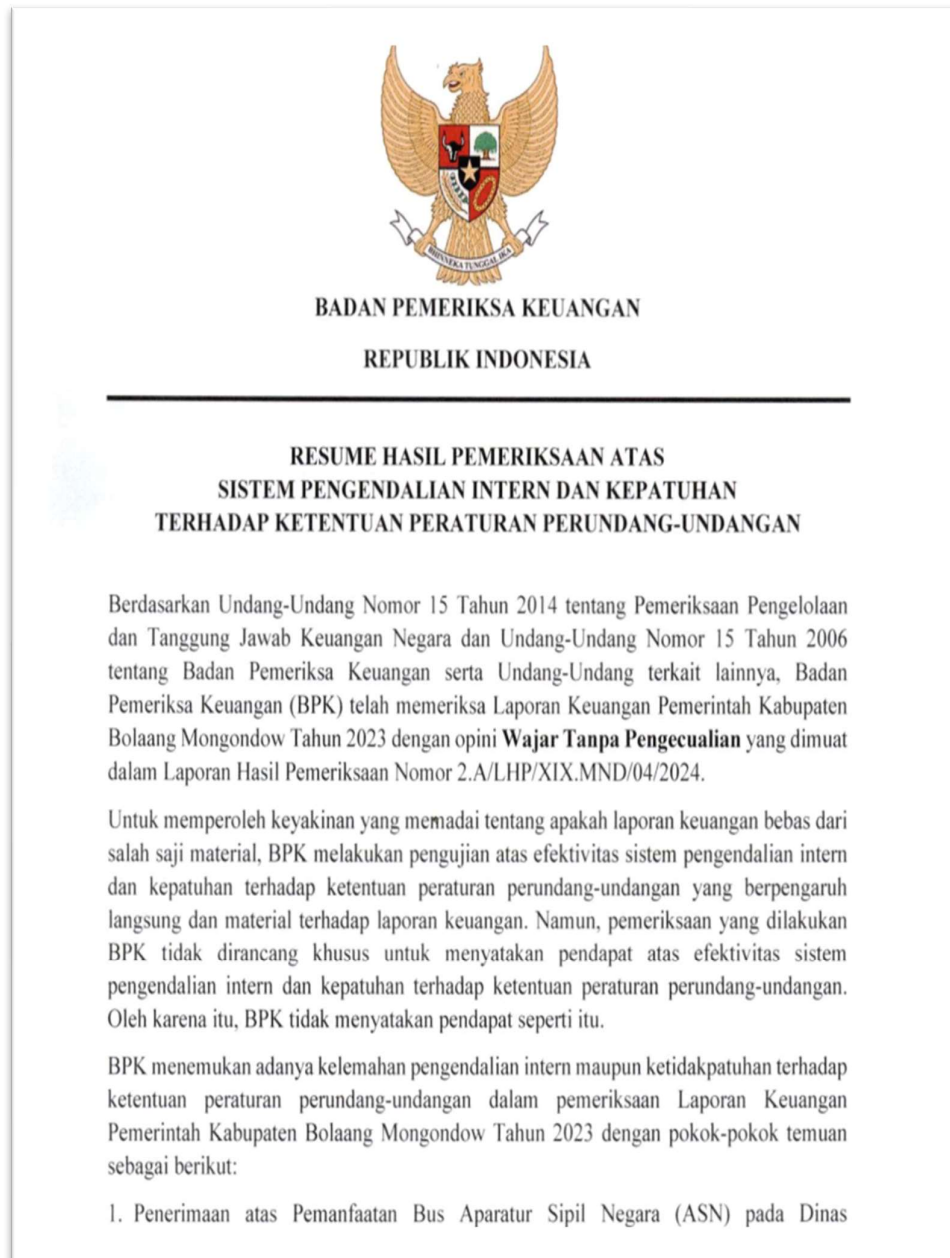
- d) Perbandingan Capaian untuk Indikator Opini LHP BPK RI atas LKPD dengan BKAD Provinsi Sulawesi Utara dimana pada Realisasi Capaian Kinerja belum ada karena masih dalam Proses Audit BPK RI. Sedangkan pada Tahun 2024 Capaian mendapat Opini WTP / 100.

Capaian Kinerja untuk Indikator Opini LHP BPK RI atas LKPD Dapat dilihat pada Grafik berikut:



- e) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Gambar 3.1. Opini BPK RI atas LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023



Tiap pemerintah daerah wajib membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan berdasarkan SAP yang akan diperiksa oleh suatu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksa BPK

dalam melaksanakan tugasnya membuat suatu laporan hasil pemeriksaan keuangan berupa opini, dan mengungkapkan dua jenis temuan, yaitu terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan atau penurunan tingkat opini tersebut belum banyak mendapat perhatian khusus terutama dari segi pengaruhnya terhadap kelemahan SPI maupun level kepatuhan peraturan perundangundangan. Oleh karena itu dalam upaya mempertahankan opini BPK yaitu WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka penyajian laporan keuangan harus tetap memperhatikan standar yang ditetapkan dalam ketentuan, serta harus meningkatkan kualitas pengendalian intern, serta pelaksanaan APBD yang harus sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

f) Analisa serta efisiensi penggunaan sumber daya.

Laporan Kinerja Tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow diperlukan SDM berhubungan dengan kemampuan terhadap detail tugas dan tanggung jawab pada tingkat:

- (1) mempersiapkan deskripsi pekerjaan;
- (2) jumlah dan kualifikasi staf; dan
- (3) terpenuhinya kebutuhan perekrutan.

Faktor kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran adalah staf yang berpengalaman dan mempunyai motivasi. Disetiap Perangkat Daerah harus mempunyai sumber daya yang terlatih dan mampu menangani tugas tugasnya terutama dalam hal membuat laporan keuangan dalam hal kompeten dalam akuntansi serta ketentuan-ketentuan perundangan dalam hal penyajian laporan keuangan. Staf juga harus dilengkapi dengan uraian tugas yang tepat. Komitmen Pimpinan sangat berperan penting dalam pelaksanaan APBD, terutama kerja keras semua Perangkat Daerah dalam berusaha memenuhi prinsip-prinsip dasar penyusunan APBD dan penyusunan laporan keuangan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Melihat beberapa hal yang akan mempengaruhi penyerapan anggaran, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow terus mengembangkan melalui mengikutsertakan ASN pada pelatihan dibidang penganggaran dan keuangan,

serta memberikan uraian tugas yang jelas untuk setiap ASN Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Untuk tingkat efisiensi pada Tahun 2025 belum dapat diukur karena masih menunggu hasil Audit BPK RI. Sedangkan pada Tahun 2024 Tingkat Efisiensi Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran Program pendukung sebesar 1,04%.

- g) Analisa Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran ini sama halnya dengan kegiatan yang menunjang pencapaian LKPD. Proses penyerapan anggaran yang optimal akan mempengaruhi optimalisasi Silpa yang diharapkan dalam APBD. Semua Program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu sebanyak 4 Program dan 12 kegiatan di Tahun 2025, sangat menunjang realisasi atas indikator kinerja ini. Dalam pencapaian kinerja ini didukung dengan Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan didalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Khususnya Badan Keuangan Daerah. Adapun Program dan Kegiatan pendukung tercapainya Opini BPK RI sebagai berikut:

**Tabel 3.5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung tercapainya
Opini BPK RI atas LKPD**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu anggaran
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	240.448.708.035,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.253.956.910,00
3	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	322.181.121,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	166.932.491,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	622.567.190,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	142.276.108,00
7	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	542.531.883,00
8	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	18.661.408,00

9	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	124.220.799,00
10	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	399.649.676,00
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	557.984.650,00
12	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	97.739.969,00
13	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	256.476.996,00
14	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	203.767.685,00
15	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	238.094.234.592,00
16	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	229.693.898.700,00
17	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.455.132.468,00
18	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	6.945.203.424,00

Sasaran Ke 2 : Presentase Peningkatan PAD

Pengukuran capaian kinerja sasaran :“Presentase Peningkatan PAD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi PAD Tahun ini} - \text{Realisasi PAD Tahun lalu}}{\text{Realisasi PAD Tahun lalu}} \times 100$$

$$= \frac{76.023.758.285,11 - 64.931.917.295,16}{64.931.917.295,16} \times 100 = -17,08\%$$

**Gambar 3.2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.**

PEMERINTAHAN KAB. BOLAANG MONGONDOW LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI) TAHUN ANGGARAN 2025 01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025					
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.160.389.264.041,60	1.153.770.725.290,11	99,42	1.060.004.317.566,16
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	76.932.298.552,85	76.023.758.285,11	98,81	64.931.917.295,16
4.1.01	Pajak Daerah	49.014.287.670,67	51.236.001.591,72	104,53	41.777.573.317,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	57.426.072,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	57.426.072,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	57.426.072,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	761.666.863,00

Untuk hasil Perbandingan Capaian Kinerja pada Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Peningkatan PAD Badan
Keuangan Daerah Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target akhir renstra
	Target	Realisasi	%	Target
Persentase Peningkatan PAD	10	17,08	17,08	10

- a) Untuk Peningkatan PAD Tahun 2025 masih dalam tahapan rekonsiliasi antara OPD Penerima Pajak Daerah dan Retribusi dengan Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- b) Penjelasan terhadap Perbandingan Target dan Capaian kinerja untuk Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari target PAD Tahun 2025 yang ditetapkan Rp76.932.298.552,85 dengan realisasi Rp76.023.758.285,11 atau 98,81% dari beberapa sector Pendapatan Daerah seperti:
 - 1) Pajak Daerah dari Target Rp49.014.287.670,67 dengan realisasi Rp51.236.001.591,72 atau 104,53 %;

- 2) Retribusi Daerah yang Dipisahkan dari target Rp19.840.547.000,00 realisasi Rp16.456.879.666,00 atau 82,94 %;
- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari target Rp3.743.236.233,00 realisasi Rp3.643.236.233,00 atau 97,32 %;
- 4) Lain-lain PAD yang Sah Target Rp4.334.227.649,18 dengan realisasi Rp4.687.640.794,39 atau 108,15%.

Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp64.931.917.295,16 Tahun 2024, dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Tahun 2025 sebesar Rp76.023.758.285,11 mengalami penurunan sebesar Rp11.091.840.989,95. Sehingga persentase Peningkatan PAD Tahun 2025 sebesar 17,08%. Dapat dilihat pada Garafik berikut:



Tabel 3.7. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Peningkatan PAD Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024			Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target akhir renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
Presentase Peningkatan PAD	10	-7,03	-70,3	10	17,08	170,8	10

- c) Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Peningkatan PAD Tahun 2024 sebesar Rp64.931.917.295,16 atau Persentase Peningkatan PAD -7,03%. Sedangkan Tahun 2025 Realisasi Peningkatan PAD sebesar Rp76.023.758.285,11 atau Persentase Peningkatan PAD 17,08% sehingga jika diukur dari realisasi kinerja pada Tahun 2025 terjadi Peningkatan sebesar 24,11%. Dapat dilihat pada Grafik berikut:



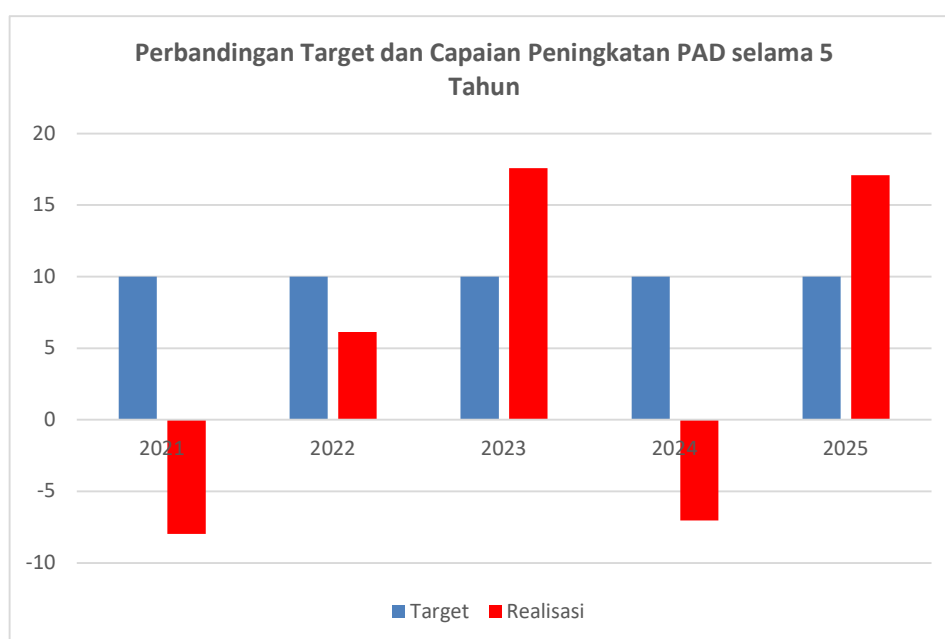
Tabel 3.8. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Persentase Peningkatan PAD 5 Tahun

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target akhir renstra	
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Presentase Peningkatan PAD	-7,96	6,14	17,59	-7,03	10	17,08	170,8	10	100

d) Dalam pencapaian kinerja selama 5 tahun Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat disajikan sebagai berikut:

- 1) Tahun 2021 Target 10% dengan realisasi sebesar -7,96% .
- 2) Tahun 2022 Target 10% dengan realisasi sebesar 6,14%.
- 3) Tahun 2023 Target 10% dengan realisasi sebesar 17,59%.
- 4) Tahun 2024 Target 10% dengan realisasi sebesar -7,03%.
- 5) Tahun 2025 Target 10% dengan realisasi sebesar 17,08%.

Untuk Perbandingan Target dan Capaian selama 5 Tahun dapat dilihat pada Grafik berikut:

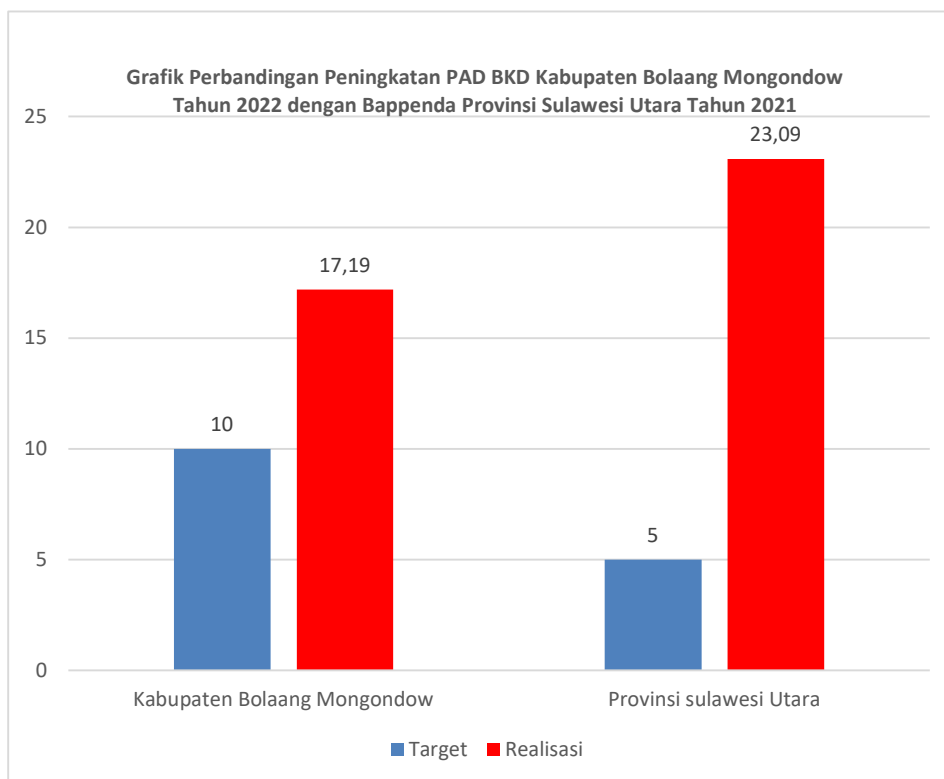


Tabel 3.9. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Peningkatan PAD dengan

Bappenda Provinsi Sulawesi Utara

Indikator Kinerja	Kabupaten Bolaang Mongondow			Bappenda Provinsi Sulawesi Utara		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Presentase Peningkatan PAD	10	17,08	170,8	5	23,09	320

- e) Perbandingan Target dan Capaian Peningkatan PAD dengan Bappenda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 adalah untuk Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Realisasi -12,68 % dari target 10% sedangkan Bappenda Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2025 dari target 5% terealisasi sebesar 23,09%. Untuk Perbandingan Target dan Capaian Peningkatan PAD dengan Bappenda Provinsi dapat dilihat pada Grafik berikut:



- f) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Komponen Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD suatu daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah, sehingga wajib dilakukan upaya-upaya untuk menggenjot pencapaiannya. Untuk menggenjot kapasitas fiskal daerah diperlukan usaha daerah menaikkan PAD pada komponen-komponen Secara umum terdapat keberhasilan-keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum berhasil pada tahun 2025. Untuk itu telah dilakukan evaluasi dan analisis secara mendalam terhadap

belum berhasilnya sasaran strategis tersebut dan akan dijadikan acuan dalam upaya perbaikan dan penanganan pada waktu-waktu yang akan datang.

g) Analisa serta efisiensi penggunaan sumber daya.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow memerlukan SDM berhubungan dengan kemampuan terhadap detail tugas dan tanggung jawab pada tingkat:

- (1) mempersiapkan deskripsi pekerjaan;
- (2) jumlah dan kualifikasi staf; dan
- (3) terpenuhinya kebutuhan perekrutan.

Faktor kunci keberhasilan dalam Pencapaian Peningkatan PAD adalah staf yang berpengalaman dan mempunyai motivasi. Melihat beberapa hal yang akan mempengaruhi peningkatan PAD, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow terus mengembangkan melalui mengikutsertakan ASN pada pelatihan dibidang Pendapatan dan Penagihan, serta memberikan uraian tugas yang jelas untuk setiap ASN Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pengelola Pendapatan Daerah.

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.11. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Presentase Peningkatan PAD	17,08	94,42	18,08

KET :

Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

Dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi alokasi anggaran dimana ditetapkan LKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu 17,08% sedangkan dari sisi penyerapan anggaran mencapai 94,42% yaitu telah menyerap anggaran sebesar Rp1.107.354.840,00.

h) Analisa Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kategori kontribusi dari 1 program dengan 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten Bolaang Mongondow terukur pada kinerja program. Proses penyerapan anggaran pada program dan kegiatan dalam pencapaian peningkatan PAD harus dioptimalkan untuk Pendapatan Daerah pada Tahun 2025. Dalam pencapaian kinerja ini didukung dengan Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan didalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Khususnya Badan Keuangan Daerah. Adapun Program dan Kegiatan pendukung tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.12. Program dan Kegiatan pendukung tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.172.804.945,00
2	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.172.804.945,00
3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	493.977.364,00
4	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	113.478.376,00
5	Penagihan Pajak Daerah	446.492.725,00
6	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	89.669.016,00
7	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	29.187.464,00

Sasaran ke 3 : Persentase Nilai Aset yang tidak bermasalah

Pengukuran capaian kinerja sasaran : “Persentase nilai aset yang tidak bermasalah” dengan indikator sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Nilai Aset Tidak Bermasalah}}{\text{Nilai Aset}} \times 100$$

Untuk pengukuran persentase nilai aset yang tidak bermasalah pada Tahun 2025 belum dapat disajikan karena masih angka asset masih bergerak karena masih melakukan rekonsiliasi asset. Untuk data valid masih menunggu data Unaudited LKPD 2025.

Persentase nilai aset yang tidak bermasalah pada Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

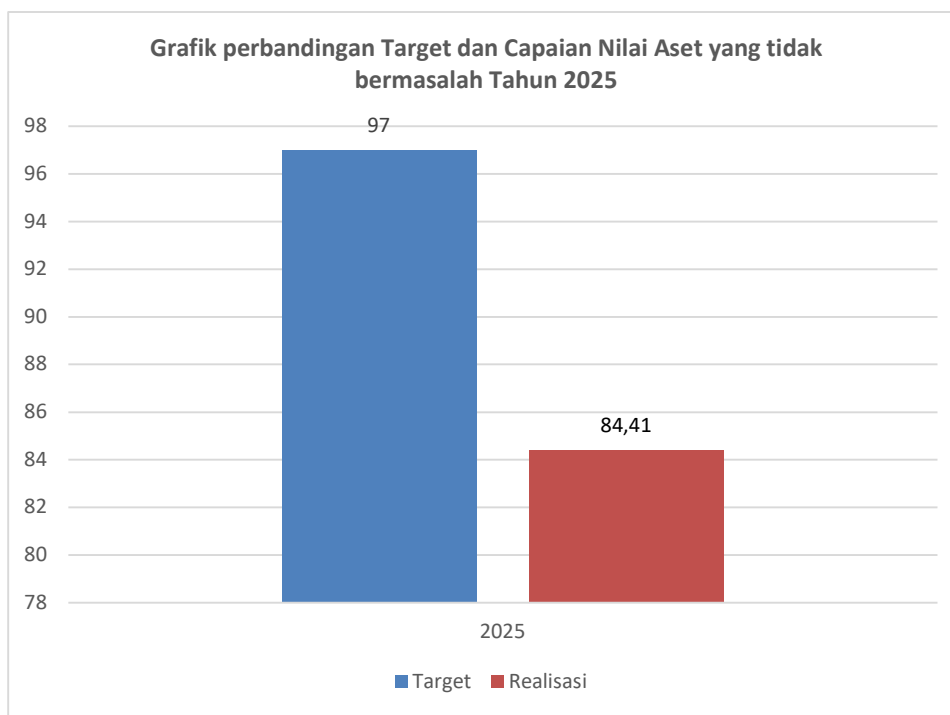
$$= \frac{1.787.167.941.278,31}{2.117.022.177.434,37} \times 100 = 84,41$$

NO.	UNIT KERJA/SKPD	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASSET TETAP LAINNYA	KONTRAKSI DALAM PENGURAIAN	TOTAL ASSET TETAP
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	190.100.000,00	2.195.997.823,00	7.424.525.000,00	54.827.000,00	11.575.090.000,00	-	21.382.544.773,00
2	BADAN KEPERAWATAN, PENCIKLAN DAN PELATIHAN	1.111.384.310,00	1.583.886.249,00	1.837.529.992,00	-	-	-	4.532.799.551,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	2.705.385.788,00	-	-	38.260.432.404,00	-	40.965.818.192,00
4	DINAS KEPENGULANGAN DAN PENCATATAN SIPK	178.324.940,00	1.501.985.275,00	1.543.929.000,00	-	-	-	3.224.239.215,00
5	DINAS KEPERAWATAN	-	482.513.931,00	-	-	-	-	482.513.931,00
6	DINAS PERKOTA	838.871.800,00	348.689.857,00	4.514.448.215,00	889.032.100,00	-	-	6.390.941.792,00
7	DINAS PERKOTA DAN LOKAL	1.781.402.213,00	4.241.793.846,00	30.916.950.285,00	140.259.450,00	-	2.308.536.980,00	39.248.842.574,00
8	DINAS PERKOTA	146.205.300,00	10.767.380.551,00	5.337.625.533,00	452.442.000,00	-	-	17.276.225.884,00
9	DINAS PERKOTA	1.100.104.100,00	1.412.055.205,00	2.748.948.177,00	6.782.018.728,00	-	-	12.043.026.210,00
10	DINAS PERKOTA	9.700.000,00	1.443.766.940,00	-	1.411.362.500,00	-	-	3.554.929.440,00
11	DINAS PERKOTA DAN KAWASAN PERMAKAMAN	109.832.800,00	788.881.500,00	-	8.043.119.000,00	-	-	9.041.743.300,00
12	DINAS PERKOTA	4.000.000,00	582.381.250,00	354.000.000,00	-	408.582.000,00	-	1.444.963.250,00
13	DINAS PERTANIAN	1.285.000.000,00	8.368.723.018,00	6.301.905.248,00	129.750.000,00	-	-	15.984.788.266,00
14	DINAS PERANAMAN MODAL DAN PTP	-	1.088.775.799,00	-	-	-	-	1.088.775.799,00
15	DINAS PERBENTENGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	946.787.310,00	-	-	-	-	946.787.310,00
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	801.642.710,00	2.106.635.435,00	6.666.287.333,00	-	-	-	9.574.565.478,00
17	DINAS SOSIAL	276.111.400,00	986.237.800,00	1.835.015.742,00	-	-	-	3.097.364.942,00
18	BADAN KEUANGAN DAERAH	-	1.348.351.399,00	195.345.000,00	76.580.000,00	-	-	1.619.876.399,00

**Tabel 3.11. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Aset Yang Tidak Bermasalah
Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target akhir renstra
	Target	Realisasi	%	Target
Presentasi Nilai Aset yang tidak Bermasalah	97	84,41	87,02	97

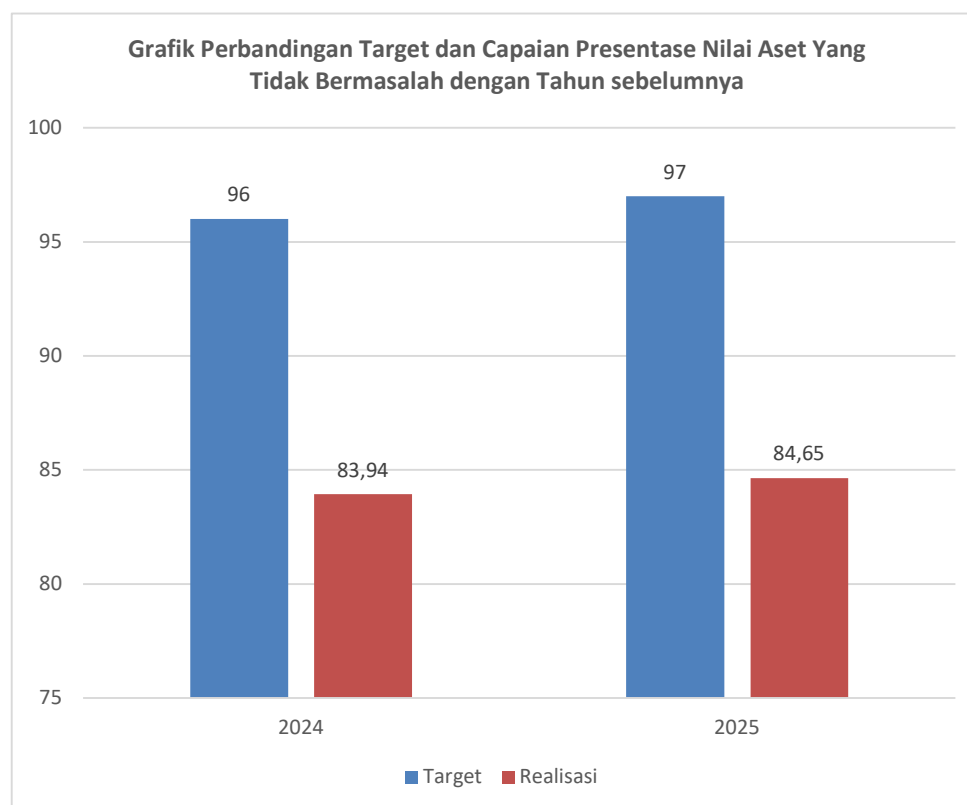
- a) Perbandingan Target dan Capaian kinerja Tahun 2025 pada indikator tersebut masih menunggu angka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Anaudited. Hal ini disebabkan Badan Keuangan Daerah sedang dalam tahapan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara. Nilai asset yang tidak bermasalah akan diketahui setelah di tetapkannya LKPD Audited Tahun 2025, sehingga diharapkan data yang valid dapat diperoleh sesuai kondisi yang ada. Besar harapan target yang ada dapat tercapai. Sehingga akan mencapai target renstra selama lima Tahun kedepan. Capaian kinerja Tahun 2025 pada indikator tersebut dapat dilihat pada Grafik berikut:



Tabel 3.12. Perbandingan Target dan Capaian Presentase Nilai Aset Yang Tidak Bermasalah dengan Tahun 2024 dan 2025

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024			Capaian Kinerja Tahun 2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Presentasi Nilai Aset yang tidak Bermasalah	96	83,94	87,43	97	84,41	87,02

- b) Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025 belum diterima karena masih dalam tahap Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Sedangkan Perbandingan Tahun 2022 dengan Tahun 2023 Capaian Kinerja 83,33% dari target 100% untuk Tahun 2022 dan 80,25 % dari Target 95% untuk Tahun 2023. Untuk Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Persetasi Nilai asset yang tidak bermasalah dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



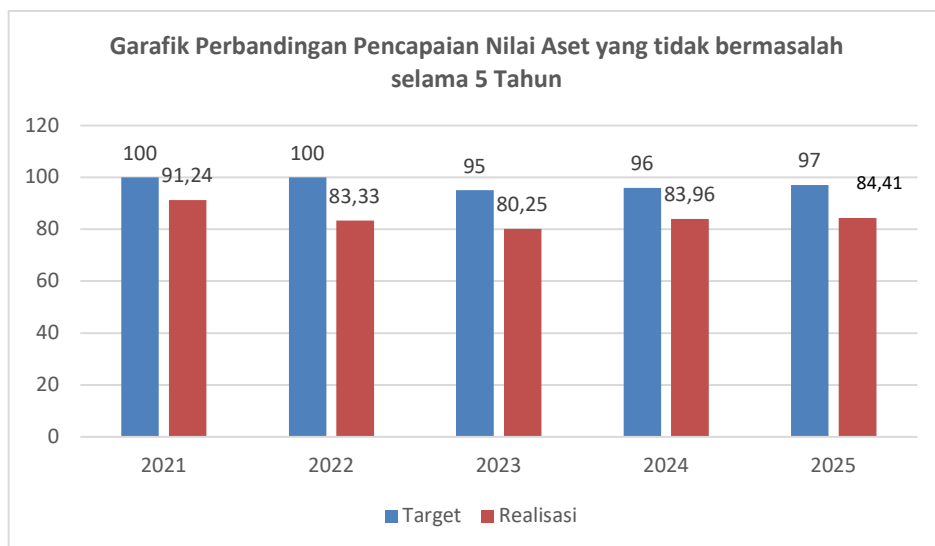
**Tabel 3.13. Perbandingan Target dan Capaian Presentase Nilai Aset Yang Tidak Bermasalah
selama 5 Tahun**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target akhir renstra	
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Presentasi Nilai Aset yang tidak Bermasalah	91,24	83,33	80,25	83,94	97	84,41	87,02	97	97

c) Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Nilai Aset yang tidak bermasalah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat disajikan sebagai berikut:

1. Tahun 2021 Target 100% dengan realisasi 91,24%.
2. Tahun 2022 Target 100% dengan realisasi 83,33%.
3. Tahun 2023 Target 95% dengan realisasi 80,25%
4. Tahun 2024 Target 96% dengan realisasi 83,94%
5. Tahun 2025 Target 97% dengan realisasi 84,41%

Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Nilai Aset yang tidak bermasalah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selama 5 Tahun dapat dilihat pada Grafik berikut:



- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Masih adanya tanah Pemda yang tidak bersertifikat sehingga memerlukan inventarisasi atas tanah-tanah Pemda yang belum bersertifikat. Terdapat juga kendala ketika tanah Pemda yang didapat dari hibah atau sumbangan dari pihak ketiga, sudah tidak memiliki bukti penyerahan berupa BAST atau surat/SK hibah. Terkait hal tersebut, perangkat daerah perlu melengkapi dengan dokumen pendukung untuk mejadi bukti kepemilikan aset yang nanti dapat disertakan dalam rangka mengurus sertifikat untuk diatasnamakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Badan Keuangan Daerah perlu berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Negara, terkait persyaratan untuk mengurus sertifikat atas tanah Pemda apalagi yang memiliki masalah kurangnya dokumen pendukung.

- e) Analisa serta efisiensi penggunaan sumber daya Diperlukan

Sumber Daya Manuasia berhubungan dengan kemampuan terhadap detail tugas dan tanggung jawab pada tingkat:

- (1) mempersiapkan deskripsi pekerjaan;
- (2) jumlah dan kualifikasi staf; dan
- (3) terpenuhinya kebutuhan perekrutan.

Faktor kunci keberhasilan dalam pengelolaan BMD adalah staf yang berpengalaman dan mempunyai motivasi. Disetiap SKPD harus mempunyai sumber daya yang terlatih dan mampu menangani tugas- Laporan Kinerja Tahun 2025 Badan Keuangan Daerah tugasnya terutama dalam hal membuat laporan BMD juga kompeten dalam akuntansi serta ketentuan-ketentuan perundangan dalam hal penyajian laporan BMD serta laporan keuangan. Staf juga harus dilengkapi dengan uraian tugas yang tepat. Melihat beberapa hal yang akan mempengaruhi penyerapan anggaran, maka Badan Keuangan Daerah terus mengembangkan melalui mengikutsertakan ASN pada pelatihan dibidang BMD, penggunaan sistem aplikasi barang serta memberikan uraian tugas yang jelas untuk setiap ASN Badan Keuangan Daerah.

Tabel 3.14. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Sasaran		Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Presentasi Aset yang Bermasalah	Nilai tidak	84,41	34,84	242,2

KET :

Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

Dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi alokasi anggaran dimana ditetapkan LKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu 84,41% sedangkan dari sisi penyerapan anggaran mencapai 34,84% yaitu telah menyerap anggaran sebesar Rp1.071.137.562,00.

- f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kategori kontribusi dari 1 program dengan 1 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten Bolaang Mongondow terukur pada kinerja program. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran ini sama halnya dengan kegiatan yang menunjang pencapaian LKPD. Proses penyerapan anggaran yang optimal akan mempengaruhi optimalisasi Penataan Aset Daerah. Dalam pencapaian kinerja ini didukung dengan Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan didalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Khususnya Badan Keuangan Daerah. Adapun Program dan Kegiatan pendukung tercapainya Nilai Aset yang tidak Bermasalah sebagai berikut:

Tabel 3.15. Program dan Kegiatan pendukung tercapainya Persentase Nilai Aset yang tidak bermasalah

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.074.875.716,00
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.074.875.716,00
3	Penyusunan Standar Harga	23.175.302,00
4	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar	12.031.710,00

	Kebutuhan Barang Milik Daerah	
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	227.769.090,00
6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	722.491.846,00
7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2.089.407.768,00

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun Anggaran 2025, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk DPPA-SKPD Tahun 2025 dengan rencana dan realisasi anggaran sebagai berikut:

1. Anggaran dan Realisasi APBD

Anggaran Belanja dari DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.257.151.391.455,04 turun dari anggaran yang dikelola Badan Keuangan Daerah pada Tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp257.385.064.995. Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2025 mencapai 94,06 %. Realisasi ini lebih rendah dari capaian tahun lalu yang mencapai 99,75 %. Perbandingan realisasi anggaran APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah :

Tabel 3.18. Perbandingan Capaian Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

No.	Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2025		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	257.385.064.995	255.787.865.058	99.38	257.151.391.455,04	241.876.329.082	94,06%

2. Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan

Capaian kinerja pada realisasi anggaran untuk masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditunjukkan seperti pada Tabel 3.6 dibawah:

Tabel 3.19. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
	BELANJA	257.151.391.455,04	241.876.329.082	94,06%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.455.002.759,04	11.373.954.204	91,32%
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.400.525.360,04	8.718.521.119	92,75%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.215.230.875,04	8.547.691.361	92,76%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	118.370.746,00	106.792.330	90,22%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	66.923.739,00	64.037.428	95,69%
1.2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	201.262.252,00	192.105.110,00	95,45%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	90.200.000,00	85.581.000	94,88%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	111.062.252,00	106.524.110	95,91%
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	831.871.910,00	824.575.541	99,12%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.915.996,00	2.822.090	96,78%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	81.618.022,00	80.665.245	98,83%
	Rapat Koordinasi	747.337.892,00	741.088.206	99,16%
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.274.851.317,00	985.840.498,00	77,33%
	Pengadaan Mebel	38.295.000,00	36.188.000	94,50%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.236.556.317,00	949.652.498	76,80%
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.283.477,00	182.291.750	81,64%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.283.477,00	57.541.750	65,18%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.000.000,00	124.750.000	92,41%
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	523.208.443,00	470.620.186	89,95%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.980.138,00	53.752.129	73,65%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	328.695.237,00	324.862.857	98,83%

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.050.000,00	47.885.400	72,50%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.483.068,00	44.119.800	79,52%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	240.448.708.035,00	228.323.882.476	94,96%
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.253.956.910,00	1.246.381.799	99,40%
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	322.181.121,00	318.147.502	98,75%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	166.932.491,00	166.199.772	99,56%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	622.567.190,00	620.400.702	99,65%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	142.276.108,00	141.633.823	99,55%
2.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	542.531.883,00	538.943.057	99,34%
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	18.661.408,00	17.727.327	94,99%
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	124.220.799,00	123.209.190	99,19%
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	399.649.676,00	398.006.540	99,59%
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	557.984.650,00	549.695.851	98,51%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	97.739.969,00	95.912.922	98,13%
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	256.476.996,00	252.778.590	98,56%
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	203.767.685,00	201.004.339	98,64%
2.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	238.094.234.592,00	225.988.861.769,00	94,92%
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	229.693.898.700,00	217.876.401.644	94,86%
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.455.132.468,00	1.176.049.100	80,82%
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	6.945.203.424,00	6.936.411.025	99,87%
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.172.804.945,00	1.107.354.840	94,42%
3.1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.172.804.945,00	1.107.354.840	94,42%
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	493.977.364,00	450.269.918	91,15%

	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	113.478.376,00	98.564.716	86,86%
	Penagihan Pajak Daerah	446.492.725,00	442.921.055	99,20%
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	89.669.016,00	88.822.417	99,06%
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	29.187.464,00	26.776.734	91,74%
4	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.074.875.716,00	1.071.137.562	34,84%
4.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.074.875.716,00	1.071.137.562	34,84%
	Penyusunan Standar Harga	23.175.302,00	22.064.075	95,21%
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	12.031.710,00	11.602.800	96,44%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	227.769.090,00	227.689.000	99,96%
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	722.491.846,00	720.985.235	99,79%
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2.089.407.768,00	88.796.452	4,25%

Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan Rp.9.215.230.875,04 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp8547691361 atau 92,76%
- b) Pada Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dianggarkan Rp.118.370.746,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.106.792.330,00 atau 90,22%.
- c) Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dianggarkan Rp.66.923.739,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.64.037.428,00 atau 95,69%

2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a) Pada sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dianggarkan Rp.90.200.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp85.581.000 atau 9%

- b) Pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan Rp111.062.252 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp106.524.110 atau 95,91%
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dianggarkan Rp2.915.996 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. Rp 2.822.090 atau 96,78%
 - b) Pada sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dianggarkan Rp81.618.022 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp80.665.245 atau 98,83%
 - c) Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dianggarkan Rp747.337.892 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp741.088.206 atau 99,16%
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pada sub kegiatan Pengadaan Mebel dianggarkan Rp38.295.000 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 36.188.000 atau 94,50%
 - b) Pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dianggarkan Rp1.236.556.317 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 949.652.498 atau 76,80%
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dianggarkan Rp88.283.477 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp57.541.750 atau 65,18%
 - b) Pada sub kegiatan Penyediaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dianggarkan Rp135.000.000 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp124.750.000 atau 92,41%
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dianggarkan Rp72.980.138 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp53.752.129 atau 73,65%
 - b) Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dianggarkan Rp328.695.237,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 324.862.857 atau 98,83%

- c) Pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dianggarkan Rp66.050.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 47.885.400 atau 72,50%
- d) Pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dianggarkan Rp55.483.068 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 44.119.800 atau 79,52%

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- a) Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dianggarkan Rp322.181.121 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp318.147.502 atau 98,75%
- b) Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp179.494.391,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp177.822.030 atau 99,07%
- c) Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dianggarkan Rp166.932.491 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp166.199.772 atau 99,56%
- d) Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dianggarkan Rp622.567.190,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp622.400.702,00 atau 99,65%

2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- a) Pada sub kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dianggarkan Rp18.661.408,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp17.727.327,00 atau 94,99%
- b) Pada sub kegiatan Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dianggarkan Rp124.220.799,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp123.209.190,00 atau 99,19%
- c) Pada sub kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dianggarkan Rp399.649.676,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp398.006.540,00 atau 99,59%

- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - a) Pada sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dianggarkan Rp97.739.969,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp95.912.922 atau 98,13%
 - b) Pada sub kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dianggarkan Rp256.476.996,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp252.778.590 atau 98,56%
 - c) Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dianggarkan Rp203.767.685,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp201.004.339 atau 98,64%
- 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a) Pada sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dianggarkan Rp225.471.105.877,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp225.404.511.321 atau 99,97%
 - b) Pada sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dianggarkan Rp1.455.132.468,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.176.049.100 atau 80,82%
 - c) Pada sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dianggarkan Rp229.693.898.700,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp217.876.401.644 atau 94,86%

C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 1) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a) Pada sub kegiatan Penyusunan Standar Harga dianggarkan Rp23.175.302 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp22.064.075 atau 95,21%
 - b) Pada sub kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dianggarkan Rp12.031.710 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp11.602.800 atau 96,44%
 - c) Pada sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah dianggarkan Rp227.769.090 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp227.689.000 atau 99,96%
 - d) Pada sub kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah dianggarkan

Rp722.491.846,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp720.985.235 atau 99,79%

- e) Pada sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dianggarkan Rp2.089.407.768,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp88.796.452 atau 4,25%

D. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a) Pada sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dianggarkan Rp493.977.364,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp450.269.918 atau 91,15%
- b) Pada sub kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dianggarkan Rp113.478.376,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp98.564.716 atau 86,86%
- c) Pada sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah dianggarkan Rp446.492.725,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 442.269.918 atau 99,20%
- d) Pada sub kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dianggarkan Rp, 89.669.016,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp88.822.417 atau 99,06%
- e) Pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Rp.29.187.464,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.26.776.734,00 atau 99,06%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban serta sarana penyampaian informasi tentang sejauh mana capaian kinerja tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 maupun di dalam RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2025-2026 yang diamanahkan masyarakat, stakeholder, dan pimpinan di atasnya.

A. TINJAUAN UMUM

Berdasarkan capaian kinerja organisasi pada Bab III di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah ialah belum bisa dinilai karena, laporan LKPD Pemerintah Daerah belum dimasukkan di BPK RI sehingga Opini untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK RI belum dirilis.

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari target PAD Tahun 2025 yang ditetapkan Rp76.932.298.552,85 realisasi Rp75.850.227.748,11 atau 98,59% dari beberapa sector pendapatan Daerah seperti:

Tabel 4.1. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	Pajak Daerah	49.014.287.670,67	51.063.874.754,72	104,18
2	Retribusi Daerah	19.840.547.000,00	16.456.449.666,00	82,94
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.743.236.233,00	3.643.236.233,00	97,32
4	Lain lain PAD yang Sah	4.334.227.649,18	4.686.667.094,39	108,13

Dari realisasi PAD Rp75.850.227.748,11 Tahun 2025, dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2024 realisasi sebesar Rp.64.931.917.295,16 mengalami peningkatan sebesar 17,08 % dari target yang tertuang di renstra sebesar 10 %.

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah masih melaksanakan rekonsiliasi. Untuk Tahun 2025 Aset tetap adalah sebesar Rp1.787.167.941.278,31 dan Total Nilai Aset Tahun 2025 sebesar Rp2.117.092.700.375,37 dengan Persentase nilai asset yang tidak bermasalah pada Tahun 2025 sebesar 84,41%.

B. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHANNYA

Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah terhadap indicator sasaran Capaian opini LHP BPK RI atas LKPD, realisasinya belum bisa dilihat karena masih menunggu Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara. Pada Sasaran Meningkatnya pendapatan asli daerah untuk indikator realisasi pendapatan Rp75.850.227.748,11 Tahun 2025, dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2024 realisasi sebesar Rp64.931.917.295,16 mengalami kenaikan sebesar 17,08% dari target yang tertuang di renstra sebesar 10 %

Pada Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah untuk indicator presentase nilai asset yang tidak bermasalah Capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir renstra 2025 belum bisa dilihat disebabkan Badan Keuangan daerah sedang melaksanakan rekonsiliasi asset/barang daerah dengan unit kerja di kabupaten bolaang mongondow.

Permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah diatas adalah terbatasnya dana serta sumber daya yang tersedia. Namun hal itu diatasi dengan efisiensi di segala bidang. Antisipasi kedepan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul adalah dengan melakukan upaya pemenuhan tenaga pelaksana yang bergerak pada segi pelayanan kepada masyarakat, serta pembinaan manajemen terutama hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan program dan pengelolaan program di samping tetap melaksanakan efisiensi di segala bidang.